

RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN 2023

WILAYAH: KEJAKSAAN TINGGI GORONTALO

FORMULIR RKT

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan masyarakat. Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum. Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif. Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum. Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel dan profesional. 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan masyarakat. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. Persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen. Persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum. Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi. Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat. 	-	6.879.454.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan perpajakan) dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel dan profesional. Konsensus penuntasan perkara pelanggaran HAM berat dengan instansi yang terkait. Perbaiki tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang berbasis teknologi informasi. Meningkatnya keberhasilan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. Meningkatnya pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain. Meningkatnya penanganan dan penyelesaian perkara koneksitas. 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyelidikan. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyidikan. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang 			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			<p>diselesaikan pada tahap penuntutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan perpajakan) dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat. • Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang secara <i>online</i> di seluruh Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi. • Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. • Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata. • Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain. 			

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah laporan hasil kegiatan penyelidikan/pengamanan/penggalangan kasus intelijen. Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi. Laporan hasil kegiatan pelacakan aset terkait tindak pidana. Pencarian/penangkapan buron tindak pidana (DPO) 	Pencarian buron tindak pidana/DPO Kegiatan/operasi intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri Kegiatan/operasi intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri. Kegiatan penelusuran aset di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Kegiatan pengawasan aliran kepercayaan masyarakat di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri Kegiatan pengamanan pembangunan strategis di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.	80.000.000,- 134.676.000,- 25.680.000,- 68.000.000,- 72.500.000,- 75.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah laporan penerangan dan penyuluhan hukum di Pusat Penerangan Hukum Layanan media dan kehumasan di Pusat Penerangan Hukum 	Pelayanan media dan kehumasan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.	18.000.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			<ul style="list-style-type: none"> Layanan informasi publik di Pusat Penerangan Hukum Jumlah laporan kerja sama hubungan kelembagaan di Pusat Penerangan Hukum Jumlah lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri Jumlah lembaga pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. Layanan informasi publik di Kejaksaan Tinggi Jumlah kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. Jumlah kampanye anti korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	<p>Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri</p> <p>Penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri</p>	<p>85.140.000,-</p> <p>253.800.000,-</p>	
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap prapenuntutan. Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap penuntutan. 	<p>Perkara tindak pidana umum dalam tahap pra penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri</p> <p>Perkara tindak pidana umum dalam tahap prapenuntutan dan penuntutan pada</p>	<p>421.250.000,-</p> <p>1.534.688.000,-</p>	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap eksekusi. Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi. Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri melalui pendekatan keadilan restoratif. Persentase penyelesaian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi. Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana korupsi. Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. Persentase penyelesaian eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. 	Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri		
				Perkara tindak pidana umum dalam tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	108.000.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	74.000.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyelidikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	506.600.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1.700.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kejaksaan Tinggi. Persentase penyelesaian penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Persentase pemberian pertimbangan hukum. Jumlah layanan informasi dan pelayanan hukum gratis. Persentase tindak lanjut laporan dan pengaduan perkara koneksitas. Persentase koordinasi dan kerja sama penanganan perkara koneksitas. Persentase prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas. Persentase eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas. Jumlah laporan pemeliharaan barang bukti dan penyelesaian barang rampasan. 	Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah I	155.880.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah II	208.380.000,-	
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III	554.950.000,-	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana tidak ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/	50.000.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.		
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	45.000.000,-	
				Dukungan kegiatan teknis perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	82.500.000,-	
				Perkara perdata dan tata usaha negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	104.000.000,-	
				Layanan informasi dan pelayanan hukum gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	36.000.000,-	
				Pertimbangan hukum yang dilakukan di	57.600.000,-	

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.		
				Pemeliharaan, pemus- nahan, penyelesaian barang bukti/sitaan/ rampasan.	399.670.000,-	
				<i>Restorative Justice</i> perkara tindak pidana umum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	12.000.000,-	
006.WA	Program Dukungan Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI. Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan RI. Meningkatnya optimalisasi kinerja Kejaksaan berbasis teknologi informasi. Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan RI. Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI. Meningkatnya integritas aparatur Kejaksaan RI. 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi. Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi. Persentase satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan. Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal. Jumlah satker yang ditetapkan sebagai satker berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Persentase penyelesaian kinerja Kejaksaan dengan <i>IT Master Plan</i>. Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara. Persentase penyelesaian pemulihan aset negara. 	-	81.830.715.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			<ul style="list-style-type: none"> Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan. Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil penilaian SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin. 			
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I. Jumlah layanan dukungan satker. Jumlah layanan perkantoran. 	Penambahan layanan internet, instalasi, jaringan, dan langganan Vsat. Layanan umum. Layanan perkantoran.	340.000.000,- 560.295.000,- 59.837.157.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
1091	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI.		Jumlah laporan.	Layanan sarana internal. Layanan prasarana internal Pembuatan pos pemilu	- 20.000.000.000,- 834.400.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri
1097	Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri		Persentase kegiatan pengawasan atas pelaksanaan tugas rutin dan pembangunan semua unsur	Pelaksanaan inspeksi umum, pemantauan, dan audit reviu.	197.963.000,-	Kepala Kejaksaan Tinggi

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
	yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung di daerah.	Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.600.000,-	
				Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	30.300.000,-	